

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga taraf hidup masyarakat terjamin dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan serta kemajuan daerahnya, karena pada dasarnya masyarakatlah yang tahu apa yang mereka butuhkan serta bagaimana kemudian mereka dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sejahtera. Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa memanglah harus disadarkan serta diperhatikan oleh pemerintah desa, dan juga oleh masyarakat itu sendiri sehingga memungkinkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaannya. (Kumayas N, 2019)

Melihat hal tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Usaha untuk menggalakkan pembangunan desa yang memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kondisi sosial masyarakat desa yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat Indonesia, melibatkan tiga pihak, yaitu pemerintah, swasta dan warga desa.

Untuk menumbuhkan kesadaran warga desa akan pentingnya usaha usaha pembangunan sebagai sarana untuk memperbaiki kondisi sosial dan dalam meningkatkan partisipasi warga desa dalam pembangunan banyak tergantung pada kemampuan pemimpin desa khususnya pimpinan dan kepemimpinan pemerintah desa atau Kepala Desa. Sebab pada tingkat pemerintahan yang paling bawah, Kepala Desa sebagai pimpinan pemerintah desa dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah desa menjadi ujung tombak pelaksanaan dan terlaksananya pembangunan desa maupun dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan desa (Lantaeda S, 2017).

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan ekonomi telah berusaha mengembangkan dan memberdayakan usaha kecil dan menengah sebagai penopang bagi perekonomian nasional, baik sebagai penyedia lapangan kerja, lapangan usaha maupun penghasil devisa negara. Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki beberapa point aturan yang berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Hal terpenting yang dibutuhkan oleh usaha kecil adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Kemajuan suatu usaha ditentukan oleh entrepreneur yang secara sistematis tumbuh pesat dan mempunyai dasar pengetahuan dimana kecepatan, gerak serta inisiatif menjadi inti kesuksesan. (*Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2022)

Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. Sebagai konsekuensi dari adanya kebijakan ekonomi daerah tersebut, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Di mana pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 berbunyi: Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha, Kecil, dan Menengah. (*Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2022)

Dengan adanya Undang-Undang tersebut, maka dapat dilihat Bahwa adanya landasan Hukum yang kuat bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Pertama, karena jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sector ekonomi. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sector UKM dapat menciptakan lebih banyak

tenaga kerja jika dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UKM dalam pembentukan produk domestic regional bruto (PDRB) cukup signifikan. (*Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2022)

**Tabel 1**  
**Ruang Lingkup Peran Kepala Desa Dalam Program Pembangunan Melalui UMKM**

Ruang Lingkup	Persoalan	Lokasi
Nasional	Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Suatu Studi di Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmathera Timur)	Desa Wayafli Kecamatan Maba Kabupaten Halmathera Timur
Regional	Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)	Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Lokal	Peran Kepala Desa Terhadap Pembangunan di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo	Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar orang beranggapan bahwa UMKM hanya menguntungkan satu pihak saja. Padahal sebenarnya UMKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran. UMKM mampu menyerap tenaga kerja, serta telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan Negara. Berdasarkan hasil Observasi awal peneliti bahwa usaha kecil dan menengah (UKM) yang ada di Desa Mentor belum berjalan secara efektif dan

sulit untuk berkembang maksimal. (*Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2022)

Banyak sekali UKM di desa Mentor yang hanya fokus menjual tanpa memikirkan bagaimana kualitas merk dari produknya seperti produk pangan khususnya dikemas dan dilabel oleh Pelaku UKM tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak terlalu menarik bagi konsumen, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami desain kemasan, dan estetika kemasan produk UKM tidak ada, sehingga baru dilihat kemasannya konsumen sudah tidak berminat. Kemudian minimnya modal usaha, akibatnya para pengusaha tidak bisa menaikkan jumlah produksinya untuk mencapai omzet lebih banyak. Oleh karena itulah peran dari kepala Desa yang ada di Desa Mentor perlu memberikan kontribusi yang sesuai dengan permasalahan pada usaha-usaha kecil yang ada di desa tersebut. Serta harus mengupayakan pemberdayaan pelaku UKM untuk meningkatkan kinerja UKM sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berdaya saing tinggi agar bisa menghadapi pasar global, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pembangunan yang dilakukan oleh kepala Desa dilakukan untuk mendorong perubahan, yang sehingga daerah menjadi maju. yang dilakukan melalui suatu pembentukan UMKM, dimana UMKM yang ada di desa Mentor perlu dikembangkan lagi. Pembentukan UMKM ini dilakukan agar para pelaku usaha yang dikategorikan masih kurang maksimal lebih baik lagi dan dapat menjalankan usahanya dengan maksimal.

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara yang dilakukan oleh Kepala Desa Mentor yaitu dengan memberikan bantuan berupa barang yang dapat membantu masyarakat yang memiliki usaha kecil atau menengah yang dimana usaha yang mereka jalankan perlu adanya bantuan dari pemerintah supaya usaha yang mereka miliki dapat bersaing dengan usaha yang lain dan usahanya dapat berjalan dengan maksimal. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian terhadap perkembangan setiap usaha yang ada di Desa Mentor.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, yang berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu UMKM merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dalam mendapatkan dukungan, perlindungan dan pengembangan sebagai wujud 3 keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi masyarakat. (*Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2022)

Penyelenggaraan pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memberdayakan masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan pemberdayaan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena UMKM merupakan salah satu penggerak bagi pertumbuhan

dan pembangunan ekonomi yang memiliki kontribusi dalam menciptakan tenaga kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. (*Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2022)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi di daerah untuk mengurangi angka pengangguran. Pemerintah daerah harus memberikan perhatian bagi tumbuh dan kembangnya lapangan usaha. Pemerintah daerah harus memberikan kontribusi yang nyata bagi UMKM dalam mempertahankan produk yang ada pada saat banyak serbuan produk impor yang masuk dipasaran dalam negeri. UMKM yang banyak tumbuh di berbagai daerah harus dikembangkan oleh pemerintah daerah, karena menjadi salah satu kunci bagi peningkatan ekonomi daerah. (*Kompas.com*. (n.d.). Retrieved September 2, 2022)

Pembangunan merupakan salah satu tugas pemerintah untuk mengangkat serta memberikan dukungan kepada masyarakat secara nyata agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam masyarakat dengan pengembangan pada usaha lokal yang akan tercipta suatu lapangan pekerjaan untuk masyarakat, serta mengembangkan inovasi masyarakat secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dimana pertumbuhan UMKM yang ada di Desa Mentor masih dikategorikan belum berjalan dengan maksimal (Lantaeda S, 2017).

Maka dari itu peran kepala desa pada Desa Mentor yang dalam program pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui UMKM. UMKM tersebut dapat memberikan pengaruh positif pada kehidupan

masyarakat desa mentor seperti diantaranya menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat, memberdayakan masyarakat setempat serta meningkatkan penghasilan ekonomi dan produktivitas masyarakat. Salah satu sasaran pokok dari peningkatan kesejahteraan masyarakat desa ialah bagaimana kepala desa meningkatkan mutu desa Mentor itu sendiri. Berdasarkan latar belakang dan hasil pemaparan diatas, maka penulis tertarik memilih judul **“PERAN KEPALA DESA DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PEMBENTUKAN UMKM”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran kepala desa dalam program pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan UMKM?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam program pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam program pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan UMKM.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam program pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan UMKM.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut adalah manfaat penelitian yang dijabarkan :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini digunakan sebagai wahana untuk mengkaji secara ilmiah gejala-gejala ekonomi yang ada dalam dunia nyata berdasarkan teori teori yang pernah diperoleh. Adapun temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Usaha Kecil dan Menengah, dan juga mengembangkannya dibidang lainnya.
- b. Temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membantu atau membina UKM di wilayah kerjanya masing-masing.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### 1. Bab I

Pendahuluan yang berisi latar belakang sebagai uraian tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Desa Dalam

Program Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pembentukan Umkm di Desa Mentor.

## 2. Bab II

Kajian Pustaka menguraikan tentang tinjauan pustaka, kerangka dasar teoritik, kerangka berfikir, dan argumen sementara sebagai jawaban sementara dari penelitian ini mengenai Peran Kepala Desa Dalam Program Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pembentukan Umkm di Desa Mentor.

## 3. Bab III

Metode Penelitian membahas tentang metode penelitian sebagai acuan peneliti bagaimana mendapatkan data-data Mengenai Peran Kepala Desa Dalam Program Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pembentukan Umkm di desa Mentor.

## 4. Bab IV

Hasil dan Pembahasanberisikan tentangPeran Kepala Desa Dalam Program Pembangunan Berkelanjutan Melalui Pembentukan Umkm di Desa Mentor.

## 5. Bab V

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang disampaikan baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.